

**Dicurigai Praktik ‘Tembak-Menembak’  
Kontraktor Minta Sosialisasi Mekanisme Lelang Proyek Pemerintah**



Sumber gambar : <https://inatonreport.com/wp-content/uploads/2021/01/ilustrasi-lelang-proyek-ist.jpg>

**BALIKPAPAN, TRIBUN** – Kontraktor lokal di Balikpapan meminta perhatian lebih dari pemerintah terkait partisipasi mereka dalam proyek pembangunan infrastruktur kota. Mereka menginginkan mekanisme yang lebih transparan dan adil dalam proses lelang. Wakil Ketua Kadin Bidang Ketenagakerjaan Kota Balikpapan, Ali Amin menegaskan perlunya sosialisasi mengenai mekanisme lelang kontraktor kepada Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Kota Balikpapan.

Ia menduga adanya praktik ‘tembak-menembak’ dalam tender yang merugikan berbagai pihak, utamanya kontraktor lokal. Amin beranggapan aspirasi kontraktor agar mereka dapat bekerja optimal sesuai harapan pemilik pekerjaan, terutama dari dinas-dinas terkait. Ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung bagi kontraktor lokal dan mendesak ULP serta dinas terkait untuk segera mengadakan sosialisasi terkait mekanisme lelang. “Kami telah melakukan pertemuan dengan Sekda dan Kepala ULP, dan mereka menyambut baik usulan kami. Kami berharap sosialisasi ini melibatkan beberapa institusi,” ungkap Amin.

Dia menilai nantinya Inspektorat dan BPK turut serta dalam proses tender untuk memastikan transparansi<sup>i</sup> dan akuntabilitas<sup>ii</sup>. Ia berharap asosiasi kontraktor seperti Kadin, Gapensi, Gapeksindo, dan Gepeknas bersatu dalam menghadapi isu ini. “Saya

berharap sosialisasi ini melibatkan institusi seperti kejaksaan, kepolisian yang menangani tipikor, dan dewan anggaran seperti Komisi 3,” tambahnya.

Amin menegaskan pentingnya memberikan kesempatan yang adil bagi kontraktor lokal dalam proses lelang dan mendorong pemerintah untuk mengevaluasi keterlibatan kontraktor dalam proyek pemerintah. “Solusi *win-win* bagi semua pihak dan perhatian terhadap aspirasi kontraktor sangat diperlukan,” pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan, Muhaimin, menyarankan agar kontraktor melakukan audiensi langsung dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan untuk mewujudkan usulan tersebut. “DPU bisa mengundang juga ULP dan Pokja PBJ,” kata Muhaimin lewat pesan singkat.

Ia juga menambahkan, jika ingin menyampaikan surat kepada Wali Kota itu bisa menjadi langkah yang lebih baik. Sementara itu, Kadis PU Balikpapan, Rita, membenarkan bahwa pekerjaan lelang lebih sering melibatkan orang luar. “Idenya (sosialisasi) bagus, kami setuju. Komunikasikan saja dengan kami,” tandas Rita. **(zyn)**

#### **Sumber berita:**

1. Tribun Kaltim, Dicurigai Praktik ‘Tembak-Menembak’, Kontraktor Minta Sosialisasi Mekanisme Lelang Proyek Pemerintah, 5/8/2024

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK 122/2023), objek lelang meliputi setiap barang yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan atau dinikmati serta mempunyai nilai ekonomis.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) PMK 122/2023, penjual harus mengadakan penjelasan lelang terhadap pelaksanaan lelang dengan objek lelang berupa:
  - a. barang tidak berwujud;
  - b. surat berharga; atau
  - c. barang bergerak dengan nilai limit keseluruhan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

---

<sup>i</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transparansi adalah suatu hal dalam kondisi nyata, jelas, dan jernih.

<sup>ii</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akuntabilitas adalah suatu keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban.